

Optimalisasi Sektor Agropolitan Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Lokal Di Masa Pandemi Covid 19

Langgeng Rachmatullah Putra¹, Taufiq Rahman Ilyas², Suyeno³

E-mail: langgengputra@unisma.ac.id¹, taufiqrahman649@gmail.com², suyeno@unisma.ac.id³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Abstract:

Optimization of the agropolitan sector as an effort to recover the economy impact of the covid 19 pandemic is strategic step taken by the East Java Provincial Government. Empowerment of the agropolitan community is an option considering its position as the spearhead of agricultural commodities. All these actions must be carried out through the development of an efficient system. The research method used is literature study by compiling data, then analyzing data, and finally drawing conclusions. The conclusions for these strategic steps including the following ; 1) Maximizing of writted regulation in institusional strengthening in the agropolitan sector, 2) Expanding cooperation between local, central goverment, financial institution, BUMN, and all related group. 3) Product Diversification, 4) Marketing Education, 5) Digital Marketing, 6) Ease of acces to capital sector. Then the advice that can be given is that the government must be consistent in supporting and providing assistance to the agropolitan community in developing agropolitan areas for local economic recovery.

Keyword : *Optimization, Empowerment, Agropolitan Sector, Local Economy, Covid 19 Pandemic.*

Abstrak:

Optimaliasi sektor agropolitan sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid 19 merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemberdayaan masyarakat agropolitan menjadi pilihan mengingat posisinya sebagai ujung tombak pada komoditas pertanian. Keseluruhan aksi itu semua harus dilakukan melalui pengembangan sistem yang efisien. Metode penelitian yang digunakan yakni studi literatur dengan pengkompilasian data, kemudian melakukan analisis data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Kesimpulan Langkah strategis tersebut meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 1) Memaksimalkan regulasi tertulis dalam penguatan kelembagaan di sektor agropolitan, 2) Perluasan kerjasama antar pemerintah daerah, pusat, lembaga keuangan, BUMN, dan semua kelompok terkait, 3) Diversifikasi produk unggulan, 4) Edukasi Pemasaran, 5) Digitalisasi pemasaran,, 6) Kemudahan akses permodalan. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus konsisten dalam mendukung dan memberikan pendampingan kepada masyarakat agropolitan dalam mengembangkan kawasan agropolitan demi pemulihan ekonomi lokal.

Kata Kunci : *Optimalisai, Pemberdayaan, Sektor Agropolitan, Ekonomi Lokal, Pandemi Covid 19*

Pendahuluan.

Pandemi covid 19 selama hampir setengah tahun ini telah mengakibatkan berbagai permasalahan yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global maupun lokal. Pemerintah Indonesia baik tingkat pusat, daerah, beserta berbagai stakeholder yang terkait telah berkolaborasi dalam hal perumusan kebijakan guna mengatasi dampak ekonomi yang selama masa pandemi tersebut mengalami instabilitas. Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah pusat diantaranya sebagai berikut: 1.) Pemerintah pusat melalui Kementrian keuangan serta Lembaga Ekonomi Nasional lainnya telah menetapkan sejumlah kebijakan guna mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19; 2.) Sejumlah kebijakan yang diambil dimana telah mangakomodir dunia usaha, UMKM, hingga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah; 3.) Kemudian Pemerintah Daerah juga melakukan penanganan terhadap instabilitas ekonomi akibat pandemi covid 19 dengan cara memaksimalkan pengadaan bahan pangan beserta kebutuhan pokok guna menjaga ketahanan pangan daerah, memberikan insentif berupa pengurangan serta pembebasan beban pajak daerah, menanggihkan waktu dengan perpanjangan terhadap kewajiban perpajakan, perpanjangan kewajiban pembayaran yang sifatnya bergulir; 4.) terakhir memberikan stimulus penguatan modal usaha kepada seluruh pelaku UMKM yang terimbas dari pandemi covid 19 tersebut.

Secara garis besar Pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Apabila dampak teknis mengenai pencegahan virus covid 19 belum teratasi dengan baik maka otomatis berdampak juga pada dampak ekonomi yang kurang maksimal secara mekasisme pemulihannya. Dan Pemerintah mempunyai langkah preventif lain sebagai alternatif strategi yakni: 1.) Menjalankan instruksi penangan covid secara konsisten seperti PSBB, penerapan protokol kesehatan dan penggunaan masker, 2.) Pengoptimalan suberdaya lokal meliputi pembiayaan, sarana, dan prasarana menggunakan APBD khususnya dari DAK kesehatan di tahun 2020 beserta Dana Desa untuk penanggulangan wabah

covid 19. 3.) Optimalisasi potensi lokal sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dasar di masyarakat, 4.) Mengembangkan inklusi keuangan melalui peningkatan akses masyarakat pada layanan keuangan formal bagi mereka yang berpendapatan rendah, 5.) Meningkatkan intervensi ekonomi dengan cara membuat kebijakan relaksasi kredit dan bantuan modal yang tepat guna di masyarakat, 6.) memaksimalkan kolaborasi dengan semua aktor meliputi Pemerintah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan Masyarakat sebagai media pertukaran informasi dalam perumusan Kebijakan (Tjenreng, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai macam potensi daerah khususnya pada sektor agropolitan memungkinkan untuk mampu mempersiapkan ketahanan pangan di masa pandemi ini. Sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2024 dengan visi terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak. Maka dari itu pengembangan area agropolitan dapat dijadikan sebuah pertahanan ekonomi dan pangan sebagaimana merealisasikan pelaksanaan pencapaian misi dari pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur yaitu “Makin Sejahtera dan Mandiri Bersama Wong Cilik” (Tim Penulis Pemprov Jawa Timur, 2020).

Berdasarkan Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Tahun 2005, Program Agropolitan memiliki pengertian pengembangan sebuah kawasan tertentu yang berbasis pada sektor pertanian. Agropolitan merupakan kota atau kabupaten pertanian yang tumbuh serta berkembang dan mampu memacu tumbuh kembangnya sistem agribisnis sehingga kemudian dapat melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan sektor pertanian di wilayah sekitar dengan tanpa ditentukan oleh sebuah batasan administrasi pemerintah melainkan oleh skala kebutuhan ekonomi yang ada. Sehingga, dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pemerintah perlu memonitoring kinerja dari instansi-instansi yang secara langsung melayani masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (Taufiq, Widodo & Hartono, 2019:1116)

Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2020 dengan gerakan pengembangan kawasan Agropolitan tercatat masih diikuti oleh 25 Kabupaten / Kota dan 2

Kabupaten yang masih dalam proses penetapan sebagai area Agropolitan yakni Kabupaten Magetan. Kemudian dari kedupuluh lima yang telah memiliki kawasan Agropolitan meliputi Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Tulungagung, Trenggalek, Pamekasan, Pasuruan, Madiun, Lamongann, Tuban, Bondowoso, Bojonegoro, Jombang, Sumenep, Sampang, Sidoarjo, Situbondo (Jatimprov.go.id).

Pada konsep Agropolitan terdapat sistem agropolitan distrik, dimana suatu daerah pedesaan dengan radius pelayanan 5-10 km dengan jumlah penduduk sekitar 50-150 ribu jiwa dan luas kepadatan minimal 200 jiwa/km². Kemudian pelayanan dan jasa yang diberikan disesuaikan berdasarkan pada tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya sekitar. Agropolitan distrik harus memiliki otonomi lokal yang memberikan tatanan terbentuknya pusat pusat pelayanan di kawasan pedesaan. Pusat pusat pelayan tersebut memiliki ciri khusus dengan adanya beberapa untuk pelayanan masyarakat pedesaan. Agropolitan juga didefinisikan sebagai sebuah sistem yang meliputi unsur unsur kegiatan pra panen, panen, pasca panen dan pemasaran dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya keberadaannya karena harus saling menyatu dan terkait. Potensi sumber daya agraria yang tersebar dengan tidak merata di setiap daerah Provinsi Jawa Timur maka dalam mekanisme pengembangannya perlu berkaitan dengan pengembangan wilayah lokal dan nasional kemudian berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWP) beserta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang sudah teridentifikasi sektor kawasan andalan maupun prioritas guna menunjang pembangunan yang berpotensi untuk meningkatkan (Pendapatan Asli Daerah) PAD.

Tujuan pengembangan kawasan area agropolitan di Provinsi Jawa Timur pada intinya adalah untuk mengembangkan daerah daerah yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan. Dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat agribisnis sebagai ujung tombak agar supaya mampu meningkatkan jumlah produksi, produktifitas komoditas pertanian, dan berbagai produk olahan pertanian lainnya Keseluruhan aksi itu semua dilakukan melalui pengembangan

sistem agribisnis yang efisiensi. Penguatan pada sektor kelembagaan petani, pengolahan hasil tani, perluasan pemasaran dengan pengembangan sistem pemasarannya, penyuluhan terpadu para petani, pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha ataupun investasi, dan peningkatan PAD yang berbasis pada sektor pertanian maupun multi sektor lainnya (Rachman, 2011).

Dampak signifikan dari adanya Pandemi Covid 19 selama beberapa bulan ini telah membuat tatanan kehidupan masyarakat dunia khususnya Provinsi Jawa Timur dalam hal aktifitas perekonomian mengalami penurunan drastis secara produksi dan pendapatan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi daerah yang mampu diandalkan khususnya sektor kebutuhan pangan yakni agropolitan untuk bisa dimaksimalkan. Pemanfaatan potensi kawasan agropolitan sebagai salah satu cara dalam pemulihan ekonomi lokal di masa pandemi merupakan langkah strategis yang bisa diupayakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Timur. Tambunan (2020) mendefinisikan bahwa pengembangan ekonomi lokal melalui agropolitan merupakan “sebuah pilihan perubahan struktur ekonomi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan ukuran capaian pengurangan kemiskinan serta penciptaan tenaga kerja dengan membangun pusat-pusat potensi pertumbuhan ekonomi di daerah”.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan pengkompilasian data, kemudian melakukan analisis data, dan terakhir penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan berupa model analisis studi literatur. Penelitian studi literatur merupakan sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai karya ilmiah karena dalam pengumpulan

data terdapat sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Pada penelitian studi literatur variabel data bersifat tidak baku, dari data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk kemudian dituangkan dalam beberapa sub bab sehingga mampu menjawab rumusan penelitian (Bungin, 2011). Untuk data literatur penelitian ini sumber data yang diperoleh didapatkan dari naskah dokumen kebijakan internet, konten, seminar, e book, dan berbagai macam sumber tertulis lainnya mengenai isu tentang pengembangan agropolitan di masa pandemi covid 19 sebagai pemulihan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Pengoptimalisasian ekonomi lokal melalui pengembangan sektor agropolitan di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulihan ekonomi lokal di masa pandemi covid 19. Jawa Timur dengan berbagai potensi agropolitan selain menjadi langkah strategis juga bisa dimaksimalkan sebagai langkah alternatif dimana pada sektor ini memiliki keunggulan produk agropolitan yang sudah diakui kualitasnya. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah pusat maupun daerah prospek signifikan pengembangan ekonomi lokal pada sektor agropolitan sangat bagus jika dilihat dari proses perkembangan yang telah dicapai khususnya di daerah daerah.

Terdapat banyak inovasi penambahan program dan produk unggulan yang kemudian menjadi pasar baru di masyarakat baik itu skala lokal, nasional , ataupun internasional. Keadaan masa pandemi covid 19 ini tentunya yang menjadi salah satu kendala adalah di sektor pemasaran yang dibatasi oleh protokol kesehatan seperti menurunnya jumlah transaksi langsung di pasar dikarenakan adanya Kebijakan PSBB dan lain protokol kesehatan lainnya. Maka dari itu dengan memaksimalkan perkembangan teknologi informasi melalui pemasaran online baik melalui, media sosial, televisi, cetak, dan berbagai patform lainnya yang telah beredar di masyarakat diharapkan menjadi solusi alternatif bagi kelancaran proses pemeasaran khususnya untuk produk produk unggulan yang dihasilkan dari produk kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Timur saat ini.

Tabel Potensi Daerah Agropolitan di Jawa Timur

No	Kota/Kabupaten	Potensi Agropolitan
1.	Lamongan	Potensi Agropolitan di Kabupaten Lamongan yang ada di wilayah selatan yang harus dikembangkan sehingga dapat memberikan dampak strategis pada kawasan tersebut;
2.	Magetan	Kawasan Plaosan, Panekan dan sebagian wilayah Poncol sebagai kawasan agropolitan hortikultura, Kawasan BETASUKA (Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan) sebagai kawasan agropolitan perkebunan. Adapun wilayah yang memiliki potensi sebagai pengembangan pertanian, meliputi:) Budidaya tanaman padi yang terdapat di Kecamatan Takeran, Ngariboyo, Bendo, Karas, dan Kartoharjo;) Budidaya tanaman jagung yang terdapat di Kecamatan Lembeyan, Plaosan dan Sukomoro;) Budidaya tanaman ubi kayu yang terdapat di Kecamatan Poncol, Parang, dan Plaosan;) Budidaya tanaman kacang tanah yang terdapat di Kecamatan Lembeyan dan Takeran;) Budidaya tanaman kacang hijau yang terdapat di Kecamatan Maospati.
3.	Ponorogo	Kegiatan agropolitan juga terus dikembangkan, Kecamatan Ngebel diproyeksikan menjadi pusat agropolitan Kabupaten Ponorogo, tentunya dengan sudah ditetapkannya Kecamatan Ngebel sebagai sentral dari agropolitan tersebut terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya pengembangan sub-terminal agro yang ada, pengembangan varietas tanaman yang semakin beragam juga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh

	Kabupaten Ponorogo.
4. Tulungagung	PKlp Perkotaan Karangrejo (Karangrejo, Sendang, Pagerwojo, Ngantru) dengan fungsipelayanan agropolitan dan industri. Pada KAS produk unggulan cengkeh, dan buah, kawasan Wilis, dengan potensi kopi,tembakau, tebu, kakao dan kelapa; dan cengkeh. Kecamatan Sendang memiliki Potensi Unggulan Utama Peternakan Sapi Perah danPotensi unggulan pendukung buah sayur manggis, durian, rambutan, wortel, sawi,buncis, bawang putih, kacang panjang

Sumber : Data Peneliti Diolah

Dari data yang diperoleh ternyata masih banyak sejumlah kawasan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi agribisnis namun masih belum dikembangkan menjadi kawasan agropolitan seperti, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Lamongan, dan juga berbagai daerah lainnya. Terdapat sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan dalam proses pengembangan sektor agropolitan untuk memaksimalkan potensi daerah di Jawa Timur diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan regulasi tertulis dalam penguatan kelembagaan di sektor Agropolitan

Sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Gubernur No. 188/40/KPTS/013/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Kelompok Kerja (POJKA) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Provinsi Jawa Timur 2015 telah dijelaskan dimana agropolitan merupakan sebuah kebijakan pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan terpadu dari beberapa departemen bidang ekonomi untuk pembangunan di kawasan pertanian pedesaan dengan langkah melengkapi infratraktur dan memperluas akses kredit usaha petani guna mendorong pertumbuhan sektor

agropolitan dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Di masa pandemi covid 19 banyak sasaran dan tujuan yang direncanakan terkendala oleh protokol kesehatan sehingga dibutuhkan alternatif aktifitas yang aman dan efektif seperti, apabila dalam perkebunan buah dan sayuran dapat mengalihkan ke sistem pertanian hidroponik, aeroponik, tanaman buah dalam pot, mengkombinasikan berbagai sistem pertanian terpadu (*Integrated Bio Cycle Farming*) dan sistem pertanian lainnya yang tidak membutuhkan lahan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah semestinya memiliki kemampuan agar dapat memberikan kesesuaian kebijakan dengan merujuk pada perubahan yang akan terjadi pada masa sekarang maupun masa depan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Larasati, Ria & Kusnan, 2021:9).

- b. Perluasan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pusat, Lembaga Keuangan, BUMN, dan semua kelompok terkait

Sebuah betuk kolaborasi yang terintegrasi akan memudahkan para pelaku di sektor agropolitan dalam menjalankan tugas dan aktifitasnya guna memenuhi segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan yang telah dirumuskan bersama sama. Pemerintah Daerah, Pusat, Lembaga Keuangan, BUMN, dan semua kelompok terkait harus duduk bersama dalam sebuah media yang dimana didalamnya adalah merumuskan sebuah rencana strategis dan dibarengi dengan komitmen bersama dalam upaya pengembangan sektor agropolitan di Provinsi Jawa Timur sebagai optimalisasi penguatan ekonomi lokal.

- c. Diversifikasi Produk

Sebagai upaya dalam mencari dan mengembangkan produk berserta perluasan pasar baru lalu dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, fleksibilitas maka diversifikasi Produk merupakan sebuah strategi untuk memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan melalui penganekaragaman produk untuk mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, fleksibilitas dengan

cara menciptakan produk atau jasa baru dengan tanpa bergantung pada satu jenis produk saja. Diharapkan dengan adanya keragaman produk di sektor agropolitan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Selain itu, dengan adanya diversifikasi produk kepada akan memberikan dampak positif yakni meningkatkan minat konsumen untuk membeli sehingga pelanggan menjadi terpuaskan. Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. (Sisilia, Nurjanah & Tukiman, 2020:101)

d. Edukasi Pemasaran

Banyak pelaku di sektor agropolitan yang masih perlu mendapatkan wawasan khusus dalam hal usaha di sektor agropolitan diantaranya ialah peningkatan sumberdaya manusia pada sebuah diversifikasi produk karena dilapangan masih banyak petani yang menggunakan teknologi lama dimana belum mendukung perkembangan kebutuhan yang sekarang. Maka dari itu dengan mengadakan kerjasama antara perusahaan IT beserta sektor terkait diharapkan mampu memberikan pelatihan untuk mengaplikasikan mekanisme pemasaran digital. Perlunya sebuah sosialisasi online sebagai testimoni dan pembiasaan oleh pemerintah kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan edukasi pemasaran produk agropolitan. Edukasi ini berisikan tentang bagaimana pengelolaan sistem pertanian tanpa atau dengan menggunakan lahan dan juga sebuah terobosan sistem pertanian yang mendukung dimana sesuai dengan protokol kesehatan.

e. Digitalisasi Pemasaran

Pemasaran digital merupakan sebuah usaha untuk mempromosikan berbagai produk sektor agropolitan dengan menjangkau konsumen secara terukur dan tepat sasaran. Aktifitas pemasaran internet umumnya meliputi dan berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, pencarian prospek atau konsumen dengan metode persuasif yang sifatnya verbal atau non

verbal dalam sebuah promosi kualitas produk khususnya di sektor agropolitan. Untuk teknis kegiatan yang harus dilakukan meliputi kegiatan pembuatan desain web, periklanan running teks, promosi pada mesin pencari informasi (*search engine*), pemasaran afiliasi, pemasaran melalui nomor ponsel yang sudah terdaftar, advertensi interaktif, dan model pemasaran online lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan “*Digital marketing is in accordance with the expected enablement. Besides that, the public must also understand how to provide good service and good communication in marketing their products through social media or mobile marketing*”. (Rahayu & Kriswibowo. 2021:58) Bahwa *digital marketing* merupakan bagian dari pemberdayaan yang diharapkan. Selain itu, dengan digital marketing masyarakat dapat memahami bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan komunikasi yang baik dalam memasarkan produknya melalui media sosial atau mobile marketing.

f. Kemudahan Akses Permodalan

Selama ini kemudahan akses permodalan masih menjadi kendala serius bagi penguatan kapital di sektor agropolitan. Dari berbagai kasus yang terjadi beberapa lembaga keuangan ternyata tidak mudah menggelontorkan dana kepada petani yang ingin mengajukan modal untuk pengembangan agribisnisnya. Hal tersebut dikarenakan petani kurang dipercaya oleh perbankan dengan alasan resiko tinggi. Namun dengan melihat peluang usaha dari sektor agropolitan yang sangat besar dan bahkan menjadi kebutuhan konsumsi dasar di masyarakat khususnya di masa pandemi saat ini maka solusi untuk permodalan adalah sangat penting sekali. Selain itu, pada dasarnya keberadaan dan peran dari variabel non-ekonomi seperti lembaga modal sosial dalam masyarakat seperti kepemimpinan, kreativitas, inovasi yang berkembang juga dapat mempengaruhi hasil dari kegiatan (Swastuti & Pudjiarti, 2021:35)

Selanjutnya, dengan memanfaatkan fintech pertanian sehingga petani dapat dengan mudah mengakses permodalan secara online atau melalui

POKJA dimana telah dipilih melalui surat keputusan Gubernur. Pemerintah bisa membuat sebuah platform fintech permodalan dengan sistem yang terintegrasi agar diharapkan siklus bisnis di kawasan sektor agropolitan mampu berjalan dengan tanpa adanya kendala dan hambatan.

Simpulan

Solusi dari hasil penelitian yang berjudul optimalisasi sektor agropolitan sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid 19 adalah sebagai berikut ; 1) Memaksimalkan regulasi tertulis dalam penguatan kelembagaan di sektor agropolitan, 2) Perluasan kerjasama antar pemerintah daerah, pusat, lembaga keuangan, BUMN, dan semua kelompok terkait, 3) Diversifikasi produk, 4) Edukasi pemasaran produk, 5) Pemasaran Digital, 6) Memudahkan akses permodalan.

Referensi

- Ahmad, Sujono. (2013) Pemasaran Langsung dan Online. Bandung: Margahayu
- Artaji, Windi. (2019) Sistem Pertanian Terpadu, Model Peratanian Terpadu, dan Satu Siklus Biologi (Integrated Bio Cycle Farming). Kompasiana.com
- Bungin, Burhan. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo
- Hermawan, Lucius. (2015) Dilema Diversifikasi Produk. Jurnal Studi Manajemen Vol. 9, No 2.
- Pengembangan Agropolitan Provinsi Jawa Timur (Jatimprov.go.id).
- Keputusan Gubernur No. 188/40/KPTS/013/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Kelompok Kerja (POJKA).
- Larasati, Nabila., Ria, Catur Ajeng Kartika., & Kusnan. (2021) Pembangunan Desa Berkembang Sebagai Desa Sejahtera dan Mandiri dalam Perspektif Administrasi Pembangunan dan Dynamic Governance. JPAP, 7 (1), 9.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.
- Puntoadi, Danis. (2011) Menciptakan Penjualan Via Sosial Media. Alex Media Komputindo.

- Rachman, Entang Saeful. (2011). Kawasan Agropolitan Adalah Kawasan Agribisnis yang Memiliki Fasilitas Perkotaan. Kompasiana.com
- Rahayu, Oka Yustin & Kriwibowo, Arimurti. (2021). *Social Enablement On Economic Recovery Process Of Sme's Sector At New Normal Era In Kediri City*. JPAP, 7(1), 48.
- RPIJM Kabupaten Magetan 2013-2017
- RPIJM Kabupatean Lamongan 2017-2021
- Saiful, Nadzir. (2015) Strategi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Agropolitan Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Sisilia, Meyga., Nurjanah, Yulia., & Tukiman. (2020). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Pencemaran Air Limbah Pabrik (Studi Kasus Sungai Kalimas Surabaya). JPAP, 6 (1), 101.
- Suharto, Edi. (2005) Membangun Masyarakat Dengan Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama.
- Swastuti, Endang & Pudjiarti, Emiliana Sri. (2021) Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Daya Saing Daerah Kota Tangerang. JPAP, 7(1), 35.
- Tambunan, Tulus. (2020) Politik Ekonomi UMKM dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19. Pustaka LP3ES. Depok.
- Taufiq, Nur., Widodo, Joko., & Hartono, Supri. (2019) Kebijakan Pelayanan E-KTP (Studi Tentang Kualitas Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rungkut). JPAP, 5(1), 1116.
- Tjenreng, Zamzami. (2020) Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid 19 Serta Pengaruhnya Bagi Ekonomi Nasional. Webinar: ARS University. Yogyakarta.
- Tjipto, Fandy. (2008) Strategi Pemasaran. Andi Press. Yogyakarta
- Tim Penulis. (2020) Protokol Percepatan Penangan Pandemi COVID 19. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID 19.
- Tim Penulis Pemerintah Jawa Timur. (2019) Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.